

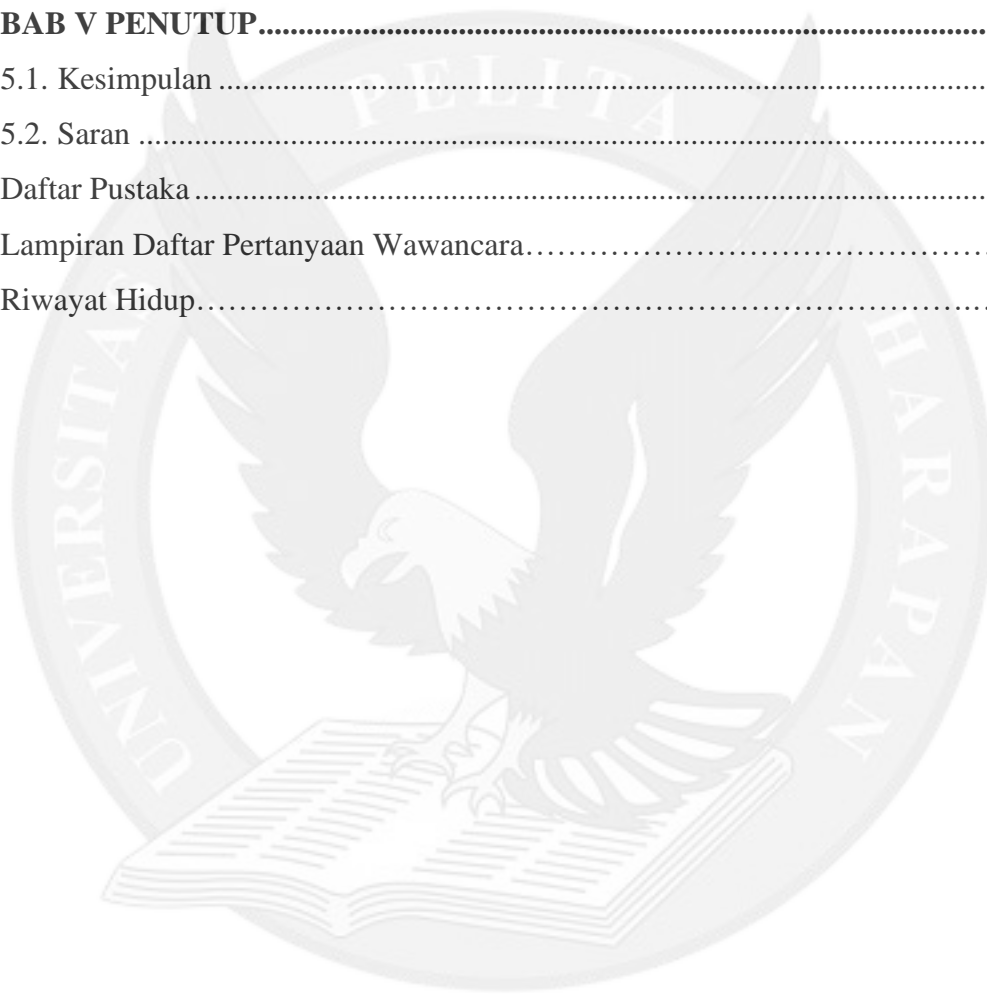
## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Pernyataan Keaslian Disertasi	
Halaman Pengesahan/Persetujuan	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak.....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Singkatan.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	40
1.3. Tujuan Penelitian .....	41
1.4. Manfaat Penelitian .....	41
1.5. Originalitas/Keaslian Penulisan .....	42
1.6. Sistematika Penulisan .....	52
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
2.1. Landasan Teori.....	55
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	55
2.1.2 Teori Hukum Responsif .....	68
2.1.3 Teori Sistem Hukum .....	71
2.2. Landasan Konseptual .....	76
2.2.1. Perbuatan Pemerintahan.....	76

2.2.2.1. Penggunaan dan Pengertian Istilah .....	76
2.2.2.2. Penggolongan Perbuatan Pemerintahan .....	85
2.2.2.3. Manifestasi Tindakan Hukum dalam Bentuk Keputusan dan Tindakan .....	88
2.2.2.4. Tindakan Faktual dapat Merupakan Tindakan <i>an sich</i> Maupun Didahului dengan Keputusan.....	91
2.2.2. Perbuatan Melanggar Hukum Pejabat Pemerintahan.....	95
2.2.3. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum Indonesia .....	100
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>112</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	112
3.2. Pendekatan Penelitian .....	115
3.3. Data Penelitian .....	117
3.4. Bahan Hukum .....	118
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	121
3.6. Analisis Data.....	125
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>127</b>
4.1. Kewenangan Mengadili Peradilan TUN Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	127
4.1.1. Yurisdiksi Peradilan TUN Sebelum Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.....	127
4.1.2. Yurisdiksi Peradilan TUN Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.....	139
4.1.3. Kewenangan Peradilan TUN Mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan .....	153
4.1.3.1 Analisis Ketepatan Pengaturan Perluasan Kewenangan Mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Peradilan Umum ke Peradilan TUN dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.....	153

4.1.3.2 Analisis Pengaturan Materi Muatan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.....	188
4.1.3.3 Keterkaitan Perbuatan Melanggar Hukum Pejabat Pemerintahan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan .....	202
4.2. Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan TUN dan Perbandingannya dengan Peradilan Umum .....	218
4.2.1. Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan TUN Setelah Berlakunya UUAP .....	218
4.2.2. Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Umum .....	271
4.2.3. Analisis Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan TUN dan Perbandingannya dengan Peradilan Umum .....	313
4.3. Model Ideal Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan TUN dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Optimal Bagi Warga Masyarakat.....	321
4.3.1. Urgensi Rekonstruksi Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan TUN.....	321
4.3.1.1 Substansi Hukum Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan .....	326
4.3.1.2 Struktur Hukum Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.....	339
4.3.1.3 Budaya Hukum Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.....	345
4.3.2. Model Ideal Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan TUN.....	356
4.3.2.1 Penguatan Upaya Administratif Partisipatoris .....	357
4.3.2.2 Simplifikasi Penyelesaian Sengketa dalam Peradilan Dua Tingkat ( <i>Two Levels Court</i> ) .....	378
4.3.2.3 Optimalisasi Jumlah dan Tata Cara Penghitungan Ganti Kerugian .....	382
4.3.2.4 Ekstensifikasi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.....	386

4.3.2.5 Pengembangan Eksekusi Kolaboratif Putusan Peradilan TUN.....	389
4.3.2.6 Pemberdayaan Musyawarah Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.....	403
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>424</b>
5.1. Kesimpulan .....	424
5.2. Saran .....	426
Daftar Pustaka .....	431
Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara.....	455
Riwayat Hidup.....	460

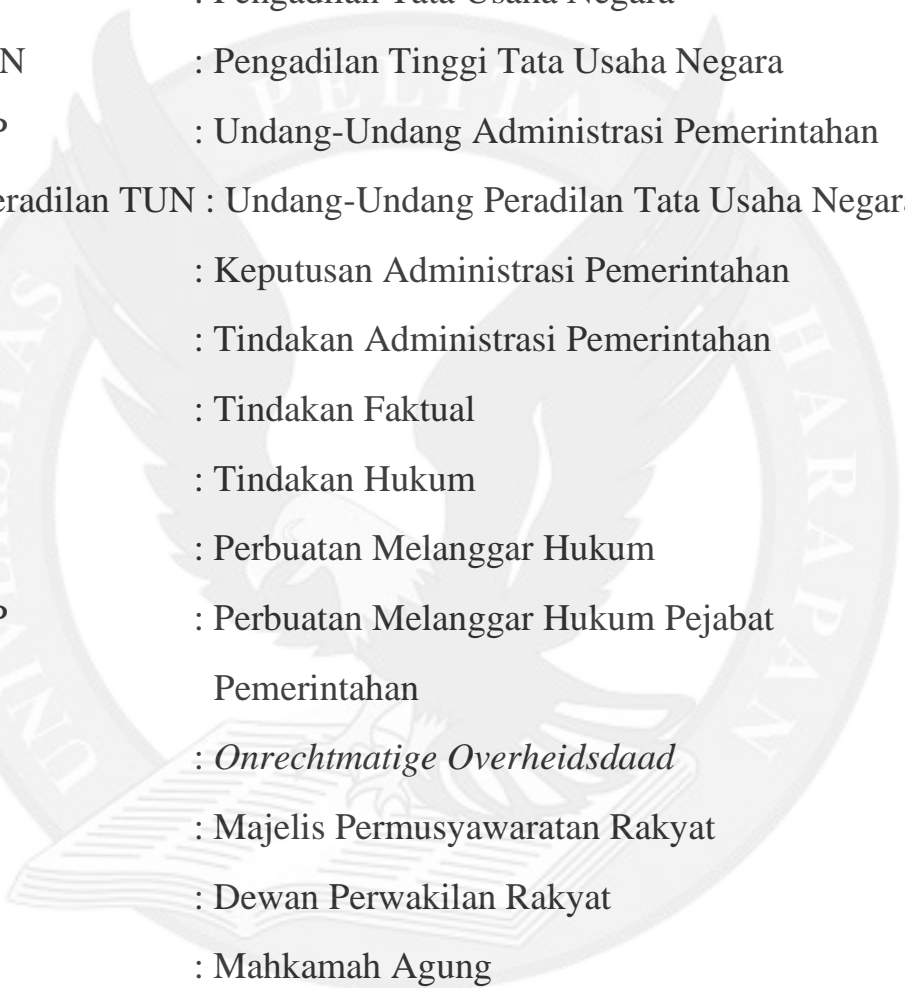


**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
2.1.	Keterkaitan Penggunaan Teori Dalam Penelitian dengan Perluasan Kewenangan Peradilan TUN Mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan	75
4.1.	Perbuatan Pemerintahan Menurut Pendapat Peneliti Berdasarkan Penggabungan Teori Hukum Administrasi dan Pengaturan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	201

## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Perbandingan Disertasi Sebelumnya dengan Disertasi Sekarang	49
2.1	Karakter Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet and Philip Selznick	70
4.1.	Rekapitulasi Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan Diadili di PTUN Jakarta dan PTUN Bandung Sejak Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	268
4.2.	Perbandingan Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan TUN dan Peradilan Umum	313
4.3.	Keadaan Pelaksanaan Mediasi di 6 (enam) Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Jawa Barat dan Sumatera Utara Tahun 2014-2017	413

**DAFTAR SINGKATAN**

TUN	: Tata Usaha Negara
Peradilan TUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PTTUN	: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
UUAP	: Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
UU Peradilan TUN	: Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
KAP	: Keputusan Administrasi Pemerintahan
TAP	: Tindakan Administrasi Pemerintahan
TF	: Tindakan Faktual
TH	: Tindakan Hukum
PMH	: Perbuatan Melanggar Hukum
PMHP	: Perbuatan Melanggar Hukum Pejabat Pemerintahan
OOD	: <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung